

EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) TERHADAP SIKLUS FISKAL DI INDONESIA

Reva Siti Nasywa Simatupang¹

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe

nasywarevasiti@gmail.com

Widia Wati²

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe

widiawatiksp@gmail.com

Putri Rizqia Julana³

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe

putriputririzqia@gmail.com

Arnita⁴

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe

arnitaarnita467@gmail.com

Teuku Zulkarnain⁵

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe

t.zulkarnain1979@gmail.com

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the Free Nutritious Meal Program (MBG) on Indonesia's fiscal cycle and human development. MBG is a national priority policy designed to improve community nutrition, reduce stunting rates, and support the vision of the Golden Generation 2045. The research employs a literature review and bibliometric analysis to evaluate the program's implementation from health, education, and economic perspectives. Findings indicate that MBG significantly enhances students' nutritional status, learning concentration, and school participation across different levels. Economically, the program contributes positively to Gross Domestic Product (GDP) growth, with a budget allocation of IDR 71 trillion in 2025 projected to raise GDP to IDR 18,958.8 trillion by 2029. Nevertheless, challenges remain, including logistical barriers in remote regions, infrastructure disparities, and risks of budget mismanagement. Therefore, applying good governance principles transparency, efficiency, and accountability is essential to ensure program sustainability. Strengthening inter-agency coordination, adopting spatial data-based evaluations, and promoting public private collaboration can enhance effectiveness and inclusivity. Overall, MBG serves not only as a nutritional intervention but also as a model for sustainable and equitable public policy in Indonesia.

Keywords: Free Nutritious Meal, Good Governance, Stunting, Fiscal Efficiency, Human Development

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap siklus fiskal dan pembangunan manusia di Indonesia. Program MBG merupakan kebijakan prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menurunkan angka stunting, serta mendukung tercapainya visi Generasi Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisis bibliometrik untuk mengevaluasi implementasi program dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG berperan penting dalam memperbaiki status gizi peserta didik, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperluas partisipasi pendidikan di seluruh jenjang. Dari sisi ekonomi, program ini memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025 yang diproyeksikan mampu meningkatkan PDB nasional hingga Rp18.958,8 triliun pada tahun 2029. Namun demikian, tantangan seperti hambatan distribusi di wilayah 3T, ketimpangan infrastruktur, dan potensi penyalahgunaan

anggaran masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penerapan prinsip good governance yang mencakup transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan program. Melalui penguatan koordinasi antarlembaga, evaluasi berbasis data spasial, serta kolaborasi publik-swasta, MBG berpotensi menjadi model kebijakan publik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia

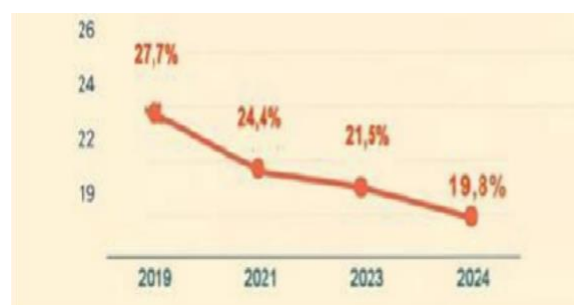
Kata kunci: Makan Bergizi Gratis, Good Governance, Stunting, Efisiensi Fiskal, Pembangunan Manusia

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan pemerintah yang bertujuan mendukung transformasi Pendidikan Indonesia menuju Generasi Emas 2045. Untuk memastikan keberhasilannya, diperlukan analisis kritis dan studi komprehensif guna mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kognitif siswa, partisipasi sekolah, serta pengurangan angka stunting. Program ini juga menghadapi masalah saat berintegrasi dengan sistem pembelajaran dari perspektif transformasi pendidikan. Beberapa program makan sekolah di negara berkembang seringkali gagal menghubungkan peningkatan nutrisi dengan perbaikan kualitas pendidikan, karena evaluasi dampak terhadap prestasi akademik siswa belum dilakukan secara sistematis. Ulasan ilmiah internasional menunjukkan bahwa efek program makan sekolah terhadap pertumbuhan dan prestasi akademik masih belum konklusif dan memerlukan evaluasi yang lebih terstruktur (Jomaa, 2011). Akibatnya program ini kemungkinan besar hanya akan berfungsi sebagai bantuan sosial tanpa menghasilkan transformasi dalam bidang Pendidikan (Albaburrahim, 2025). Selain itu,

terdapat tantangan ekstra yang harus diwaspadai dengan melibatkan pengawasan dari berbagai pihak terkait, misalnya risiko korupsi saat membeli bahan makanan serta penolakan budaya terhadap jenis menu tertentu di sejumlah wilayah.

Program MBG memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia yang masih menjadi isu penting. Berdasarkan data terbaru (SSGI, 2024) dan laporan (UNICEF, 2025) prevalensi stunting nasional telah turun menjadi sekitar 19,8% pada tahun 2024 (dari 21,5% pada 2023) dan masih memengaruhi lebih dari 4,5 juta anak di bawah 5 tahun, menunjukkan tren perbaikan namun tetap membutuhkan upaya serius. Menurut data Kementerian Kesehatan, tren stunting menunjukkan penurunan yaitu:



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024
Gambar 1.1 Data Penurunan Stunting Di Indonesia

Ini menandakan bahwa langkah-langkah untuk memperbaiki kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia telah berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan. Walaupun secara keseluruhan terjadi penurunan di tingkat nasional, data infografis menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antarwilayah. Beberapa provinsi bahkan telah mencapai tingkat prevalensi yang sangat rendah, jauh di bawah rata-rata nasional. Bali menempati posisi teratas dengan prevalensi hanya 8,6 persen disusul oleh Jawa Timur 14,7 persen dan Kepulauan Riau 15 persen. Prestasi di provinsi-provinsi tersebut bisa dijadikan contoh bagi daerah lainnya. Di sisi yang berbeda, beberapa provinsi masih menghadapi hambatan serius akibat tingkat stunting yang sangat tinggi. Papua Barat Daya mencatat prevalensi sebesar 30,5 persen Sulawesi Barat 35,4 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki angka tertinggi yaitu 37 persen (GoodStats, 2025). Data ini menunjukkan kebutuhan akan perhatian lebih mendalam, tindakan pencegahan yang lebih kuat, serta sasaran yang lebih spesifik di daerah-daerah tersebut agar bisa mengejar ketinggalan dan menyamai rata-rata nasional.

Secara umum, faktor utama keberhasilan dalam mencegah stunting

bergantung pada langkah-langkah yang diterapkan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup masa sebelum kelahiran, saat persalinan, dan setelahnya. Melalui pendekatan serta tindakan yang sesuai, pengurangan stunting di Indonesia bisa dipercepat untuk mencapai target yang diinginkan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Angka stunting ini masih tergolong tinggi karena WHO menetapkan ambang batas stunting maksimal sebesar 20 persen. Stunting berdampak jangka panjang pada perkembangan otak, sistem kekebalan tubuh, serta produktivitas generasi masa depan.

Program MBG sejalan dengan Asta Cita ke-4 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK, 2024), yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan gizi sebagaimana salah satu fokus quick win pemerintah. yang mencakup pemberian makanan sehat di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Korea Selatan menjadi contoh sukses, di mana program serupa didanai oleh pemerintah daerah dan dijalankan secara terdesentralisasi oleh kepala sekolah, berkat dukungan regulasi dan pendanaan berkelanjutan. Di Indonesia, Program MBG telah

dimasukkan dalam RKP dan APBN 2025. sebagaimana tercantum dalam Buku II Nota Keuangan. Program ini bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas SDM, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM (Usulan et al., 2025). Program MBG merupakan kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, menurunkan angka stunting, serta membentuk pola makan sehat dan perilaku hidup bersih sejak dini.

Program MBG menyasar sekitar 19,47 juta penerima, terdiri dari anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025. Dari jumlah tersebut, Rp63,356 triliun dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk dukungan manajemen (Liputan6.com, 2024). Uji coba program MBG telah dimulai sejak Agustus 2024 di Kota Tangerang, melibatkan 76 sekolah tingkat SD dan SMP, dengan target mencakup 99 sekolah dan sekitar 70.000 siswa hingga akhir November 2024 (KonsepNews.com.,2024).

Selain menyediakan makanan bergizi, program ini juga bertujuan membentuk pola makan sehat dan membina perilaku hidup bersih pada anak sejak dini. Pelaksana utama program ini adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah

membangun 85 satuan pelayanan, berfungsi sebagai dapur sekaligus offtaker produk pertanian lokal, dengan kapasitas melayani 3.000 siswa per unit. Biaya pembangunan per unit sekitar Rp1,2–1,5 miliar, dengan tambahan alat senilai Rp700 juta.

Penyaluran MBG dilakukan melalui tiga skema. Pertama, pembangunan dapur pusat untuk wilayah dengan akses mudah. Kedua, dapur di sekolah atau pesantren yang memiliki minimal 2.000 siswa. Ketiga, daerah terpencil yang akan dilayani melalui pengiriman makanan kemasan vacuum dengan pengiriman mingguan atau bulanan. Hingga akhir 2024, BGN menargetkan uji coba di 100 titik, mayoritas berada di Pulau Jawa (Kompas.com, 2025). Teori Governance menyoroti perlunya kolaborasi antara berbagai aktor seperti pemerintah pusat, daerah, sekolah, swasta, dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan kebijakan public (Ansell, C., & Gash, 2008).

Street-Level Bureaucracy Theory menguraikan peran krusial pelaksana di lapangan seperti guru dan petugas dapur dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik nyata, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya (Lipsky, 2010). Sementara itu, *Equity Theory* menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi layanan, di mana program harus menyesuaikan kebutuhan nutrisi berdasarkan kondisi lokal dan

memprioritaskan kelompok yang paling rentan (Whitehead, 1992). Secara keseluruhan, kebijakan ini bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana nilai-nilai good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik diterapkan (Lendra et al., 2025).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif yang mengombinasikan pendekatan systematic literature review dan analisis bibliometric. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi tren penelitian dan kesenjangan konseptual dalam topik kebijakan publik gizi di Indonesia. untuk menganalisis secara kritis penerapan program MBG di Indonesia dalam konteks transformasi pendidikan menuju Generasi Emas 2045. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dari jurnal dan artikel ilmiah terkait topik penelitian. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mengintegrasikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema sejenis sebagai bagian dari kajian pendahuluan (preliminary studies), serta membandingkannya dengan literatur terkini. Dengan cara ini, proses verifikasi terhadap penelitian terdahulu dapat membantu mengidentifikasi unsur kebaruan (novelty) dalam penelitian yang dilakukan. (Lendra et al., 2025).

Pendekatan studi pustaka ini dilengkapi dengan analisis bibliometrik, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kajian deskriptif dan kajian evaluatif. Kajian deskriptif bertujuan untuk mengukur produktivitas ilmiah melalui jumlah artikel, buku, atau media komunikasi lainnya, sementara kajian evaluatif digunakan untuk mengukur penggunaan literatur melalui perhitungan sitasi atau rujukan dalam karya ilmiah. Dalam penelitian ini, analisis bibliometrik difokuskan pada literatur yang dianalisis diterbitkan antara tahun 2019–2025 dengan total 50 artikel relevan. yang berkaitan dengan tema "Makan Bergizi Gratis" dan relevansinya terhadap nilai-nilai good governance. Data dikumpulkan melalui Dimensions.ai dan Google Scholar menggunakan kata kunci 'makan bergizi gratis', 'school feeding', 'stunting', dan 'good governance'. yang dicari pada judul artikel dengan memanfaatkan analisis bibliometrik ini, penelitian dapat mengungkap pola distribusi pengetahuan, topik-topik yang paling banyak diteliti, serta potensi kebaruan dalam konteks studi mengenai program makan bergizi gratis dan penerapannya dalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Lendra et al., 2025). Pendekatan ini diharapkan mampu menyajikan peta pengetahuan (knowledge mapping) terkait kebijakan MBG dan prinsip good governance di Indonesia, serta memberikan dasar

konseptual bagi penelitian empiris lanjutan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Analisis Bibliometrik

Analisis bibliometrik dilakukan terhadap 50 artikel ilmiah periode 2019–2025 yang dikumpulkan melalui Dimensions.ai dan Google Scholar dengan kata kunci makan bergizi gratis, school feeding, stunting, dan good governance. Hasil pemetaan menunjukkan tren peningkatan publikasi sejak 2020 dan lonjakan pada 2023–2025, seiring meningkatnya perhatian kebijakan terhadap gizi anak dan pendidikan. Distribusi tema membentuk empat klaster utama: (1) dampak gizi dan stunting; (2) capaian pendidikan; (3) tata kelola dan kolaborasi multi-aktor; (4) keadilan distribusi layanan.

Tabel 1. Distribusi Publikasi Berdasarkan Tahun (2019–2025)

Tahun	Jumlah Artikel	Persentase
2019	4	8%
2020	6	12%
2021	7	14%
2022	9	18%
2023	11	22%
2024	8	16%
2025	5	10%
Total	50	100%

Sumber: Data diolah penulis 2026

Tabel 2. Klaster Tema Literatur Program Makan Sekolah

Klaster Tema	Fokus Kajian	Jumlah Artikel	Persentase
Gizi & Stunting	Status gizi, penurunan stunting	16	32%
Capaian Pendidikan	Kehadiran, kognisi, prestasi belajar	12	24%
Tata Kelola	Governance, kolaborasi	13	26%

	multi-aktor		
Keadilan Distribusi	Equity, wilayah rentan	9	18%
Total		50	100%

Sumber: Data diolah penulis 2026

Temuan ini menunjukkan bahwa diskursus ilmiah memposisikan program makan sekolah sebagai intervensi multidimensi yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan tata kelola.

Hasil Kajian Pustaka Tematik

a. Dampak terhadap Status Gizi dan Stunting

Literatur menunjukkan bahwa program makan sekolah berkontribusi terhadap perbaikan status gizi anak, meskipun besaran dampaknya bervariasi tergantung kualitas implementasi (Jomaa, 2011). Dalam konteks Indonesia, penurunan stunting nasional dari 27,7% (2019) menjadi 19,8% (2024) (SSGI, 2024);Kemenkes BKBK, 2024) mengindikasikan efektivitas intervensi gizi. Namun, kesenjangan antarwilayah masih signifikan, dengan NTT (37%), Sulawesi Barat (35,4%), dan Papua Barat Daya (30,5%) mencatat prevalensi jauh di atas rata-rata nasional (GoodStats, 2025). Hal ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis kebutuhan lokal.

b. Dampak terhadap Capaian Pendidikan

Ulasan sistematis menunjukkan hubungan yang belum konklusif antara program makan sekolah dan prestasi akademik (Jomaa, 2011). Dalam konteks

Indonesia,(Albaburrahim,2025).

menekankan belum adanya evaluasi sistematis terhadap dampak Program MBG pada hasil belajar siswa

c. Tata Kelola dan Kolaborasi Multi-Aktor

Governance Theory menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor (Ansell, C., & Gash, 2008). Program MBG telah mengadopsi pola ini melalui BGN, pemerintah daerah, sekolah, dan UMKM lokal. Namun, literatur memperingatkan potensi inefisiensi dan lemahnya akuntabilitas tanpa koordinasi yang kuat.

d. Implementasi Lapangan dan Peran Pelaksana

Street-Level Bureaucracy Theory menegaskan peran guru dan petugas dapur sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan (Lipsky, 2010). Keterbatasan sumber daya mendorong penggunaan diskresi, sehingga variasi kualitas layanan antarwilayah sulit dihindari.

e. Keadilan Distribusi Layanan

Equity Theory menekankan perlunya perlakuan berbasis kebutuhan (Whitehead, 1992). Tiga skema distribusi MBG dapur pusat, dapur sekolah/pesantren, dan pengiriman vacuum secara normatif sejalan dengan prinsip keadilan distributif (Kompas.com, 2025), namun masih membutuhkan pemetaan kebutuhan yang lebih rinci.

Tabel 3. Triangulasi Tematik Program MBG

Tema Utama	Temuan Literatur	Relevansi dengan MBG	Implikasi Kebijakan
Gizi & Stunting	Program makan sekolah meningkatkan status gizi (Jomaa, 2011)	MBG relevan untuk percepatan penurunan stunting	Prioritas wilayah rentan, menu berbasis kebutuhan lokal
Capaian Pendidikan	Dampak pendidikan belum konklusif (Jomaa, 2011)	Risiko MBG hanya menjadi bantuan sosial	Integrasi dengan kurikulum & indikator hasil belajar
Tata Kelola	Kolaborasi multi-aktor krusial (Ansell, C., & Gash, 2008)	MBG melibatkan BGN, daerah, UMKM	Perlu mekanisme koordinasi & akuntabilitas
Implementasi	Pelaksana lapangan menentukan hasil kebijakan (Lipsky, 2010)	Variasi kualitas layanan MBG	SOP jelas & pelatihan berkelanjutan
Keadilan	Keadilan berbasis kebutuhan (Whitehead, 1992)	Skema distribusi MBG adaptif wilayah	Pemetaan gizi rinci & afirmasi daerah tertinggal

Sumber: Data diolah penulis 2026

Sintesis bibliometrik dan kajian tematik menunjukkan bahwa Program MBG memiliki potensi strategis dalam penurunan stunting dan pembangunan SDM. Namun, dampaknya terhadap transformasi pendidikan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, koordinasi lintas sektor, serta keadilan distribusi layanan.

Penelitian ini memperkuat implikasi

teoretis yang relevansi yaitu Governance Theory, Street-Level Bureaucracy Theory, dan Equity Theory dalam analisis kebijakan gizi berbasis sekolah. Temuan juga mengungkap celah konseptual berupa minimnya model evaluasi dampak pendidikan terintegrasi dalam kebijakan MBG.

Penelitian ini memperkuat implikasi praktis yang relevansi dengan Pengembangan indikator kinerja MBG yang mencakup hasil Pendidikan, Penguatan SOP dan pengawasan pengadaan bahan makanan, Integrasi MBG dengan kurikulum pendidikan gizi, Prioritas wilayah dengan prevalensi stunting tinggi .

Penelitian ini berbasis data sekunder sehingga belum merefleksikan praktik lapangan secara empiris. Penelitian lanjutan berbasis survei atau studi lapangan diperlukan untuk menguji dampak MBG terhadap capaian pendidikan dan penurunan stunting.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis bibliometrik periode 2019–2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki posisi strategis sebagai kebijakan publik multidisipliner yang mengintegrasikan dimensi gizi, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemetaan literatur menunjukkan tiga fokus utama kajian:

- (1) Peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat yang berimplikasi langsung terhadap penurunan stunting dan peningkatan kapasitas kognitif anak;
- (2) Penguatan prinsip good governance melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pemerataan layanan publik; serta
- (3) Dampak ekonomi makro berupa peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pemberdayaan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional.

Sintesis dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen fiskal dan kebijakan pembangunan manusia yang berorientasi pada keadilan sosial dan efisiensi anggaran negara. Implementasi program ini sejalan dengan teori New Public Management (NPM) dan Equity Theory, yang menekankan pentingnya hasil terukur, keadilan distribusi, serta partisipasi publik dalam tata kelola layanan sosial.

Dengan demikian, keberhasilan MBG ditentukan oleh integrasi multisektoral yang kuat antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, disertai penguatan sistem monitoring berbasis data spasial serta evaluasi longitudinal.

Penelitian ini merekomendasikan agar MBG dikembangkan sebagai model kebijakan publik berbasis bukti (evidence-

based policy) yang mampu mendorong efisiensi fiskal, memperkuat ketahanan pangan, dan mewujudkan pembangunan manusia berkelanjutan menuju Generasi Emas 2045.

E. Daftar Pustaka

- Albaburrahim. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Jurnal ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*.
<https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/10851/3874/37196>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- GoodStats. (2025). Potret stunting di Hari Anak Nasional: 10 provinsi dengan prevalensi tertinggi di Indonesia. <https://data.goodstats.id/statistic/potret-stunting-di-hari-anak-nasional-ini-10-provinsi-dengan-prevalensi-tertinggi-vAzho>
- Jomaa, L. H. (2011). School feeding programs in developing countries: impacts on children's health and educational outcomes. *PubMed*. 1 Februari 2011.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2010.00369.x>
- Kemkes BKBK. (2024). Potret stunting di Indonesia – prevalensi stunting nasional menurun dari 27,7 % pada 2019.
<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/potret-stunting-di-indonesia/>
- KemenkoPMK. (2024). Program makan bergizi gratis wujudkan SDM unggul melalui perbaikan gizi. <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/program-makan-bergizi-gratis-wujudkan-sdm-unggul-melalui-perbaikan-gizi>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). 1000 HPK kunci cegah stunting. <https://ayosehat.kemkes.go.id/1000-hpk-kunci-cegah-stunting?>
- Kompas.com. (2025). Dimulai besok, berikut skema pemberian makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah. 5 January 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/05/09502421/dimulai-besok-berikut-skema-pemberian-makan-bergizi-gratis-yang-disiapkan>
- KonsepNews.com. (2024). Program Makan Bergizi Gratis di Kota Tangerang: 76 sekolah sudah terjangkau dengan target 99 sekolah hingga November 2024. 29 Oktober 2024. <https://konsepnews.com/2024/10/29/program-makan-bergizi-gratis-di-kota-tangerang-76-sekolah-sudah-terjangkau-target-99-sekolah-hingga-november-2024>
- Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cs_djgS5v-UC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Lipsky,+M.+\(1980\).+Street-level+bureaucracy:+Dilemmas+of+the+individual+in+public+services.+Russell+Sage+Foundation&ots=mMo1ygCJ66&sig=ZCheeCTK8fDjqNIWQbfgm4XW_Bo](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cs_djgS5v-UC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Lipsky,+M.+(1980).+Street-level+bureaucracy:+Dilemmas+of+the+individual+in+public+services.+Russell+Sage+Foundation&ots=mMo1ygCJ66&sig=ZCheeCTK8fDjqNIWQbfgm4XW_Bo)
- Liputan6.com. (2024). Makan Bergizi Gratis sasar 19,47 juta orang di 2025, anggaran Rp71 triliun cukup? 30 Desember 2024.
- (SSGI), S. S. G. I. (2024). Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198/?utm_source=chatgpt.com
- UNICEF, I. (2025). Nutrition: Child

nutrition in Indonesia. United Nations
Children's Fund. Title.
https://www.unicef.org/indonesia/nutrition?utm_source=chatgpt.com

Whitehead, M. (1992). The concepts and principles of equity and health. *Health Promotion International*, 22(3), 429–445.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2190/986L-LHQ6-2VTE-YRRN>